

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Kota Blitar

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666431-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602560-31012024120451

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

anak_jiak@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 12:04:51



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BANK
Kota Blitar

Laporan Penerapan

TATA KELOLA

PERIODE 31 DESEMBER 2022

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telp. 0342-815533, Faks. 0342-815016

email : apb_08@yahoo.co.id

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Nomor Telepon : (0342)-815533

Penjelasan Umum : Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar, adalah merupakan salah satu keharusan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR yang harus dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Perumda BPR Kota Blitar mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada. Ketentuan Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar mengikuti 5 pilar utama, yang terdiri dari : Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness) sebagaimana tertuang dalam ketentuan intern berupa Pedoman Tata Kelola, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Peningkatan penerapan tata kelola merupakan langkah tepat bagi Perumda BPR Kota Blitar agar dapat tetap bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen Perumda BPR Kota Blitar terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edy Prasetyo	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Jabatan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, yaitu: a) bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; e) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; f) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; g) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2023, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas, antara lain: a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ; b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan serta monitoring inisiatif bisnis baru ; c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi ; d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ; e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ; f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ; g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi yang bernama Edy Prasetyo menjabat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/63/HK/410.020.3/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perumda BPR Kota Blitar. Dan terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Perumda BPR Kota Blitar serta mengingat belum terdapat Direktur Utama, maka posisi anggota Direksi yang membawahkan fungsi penyaluran dana dirangkap oleh Direktur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mokhammad Sidik	Komisaris Utama	Jabatan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
2	Raden Agung Andokoputro	Komisaris	Jabatan Komisaris (Anggota Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya dengan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Pengawas senantiasa merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya. Terkait dengan hal itu, selama tahun 2023 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain: a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ; b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ; c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ; d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham; e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan penerapan manajemen risiko.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Pengawas yang menduduki jabatannya, diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Blitar No. 188/64/HK/410.020.3/2023 dan tanggal 1 Februari 2023 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar dan Keputusan Walikota Blitar No. 188/65/HK/410.020.3/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hingga saat ini Perumda BPR Kota Blitar masih belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, mengingat modal inti masih = Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila telah mempunyai modal inti = Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) wajib membentuk kelengkapan paling sedikit berupa: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edy Prasetyo	1	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2023, tidak ada Direksi yang turut memiliki saham Perumda BPR Kota Blitar .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Edy Prasetyo	Nihil	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai akhir Desember 2023, tidak ada Direksi yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edy Prasetyo	Nihil	Nihil	Nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris (dewan pengawas), maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edy Prasetyo	Nihil	Nihil	Nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris (dewan pengawas), maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mokhammad Sidik	1	0,01
2	Raden Agung Andokoputro	1	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hingga akhir Desember 2023, tidak ada Anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) yang memiliki saham pada Perumda BPR Kota Blitar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mokhammad Sidik	Nihil	0,01
2	Raden Agung Andokoputro	Nihil	0,01

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hingga akhir Desember 2023, tidak ada Anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) yang memiliki saham pada Perusahaan Lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mokhammad Sidik	Nihil	Nihil	Nihil
2	Raden Agung Andokoputro	Nihil	Nihil	Nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota dewan komisaris (dewan pengawas) yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris (dewan pengawas) lain, anggota direksi, maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mokhammad Sidik	Nihil	Nihil	Nihil
2	Raden Agung Andokoputro	Nihil	Nihil	Nihil

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada anggota dewan komisaris (dewan pengawas) yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris (dewan pengawas) lain, anggota direksi, maupun pemegang saham (KPM).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	72358400	2	133619694
2	Tunjangan	2	94210006	2	0
3	Tantiem	2	4048348	2	1295471
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	14962500	2	4770000
	Total		185579254		139685165

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	rumah dinas atau pengganti sewa rumah	rumah dinas atau pengganti sewa rumah
2	Transportasi	kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan	kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan
3	Asuransi Kesehatan	BPJS atau lainnya	BPJS atau lainnya
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Th. 2021 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,90	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,50	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,60	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,40	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,08	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR masih memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar. BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun pedoman manajemen risiko secara tertulis, serta melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR berupaya untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR berupaya menerapkannya sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	BPR belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM berkaitan dengan manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah berupaya menyusun laporan tersebut dan menyampaikannya kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR berupaya menyusun laporan produk dan aktivitas baru (apabila ada) dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait yang lengkap / menyeluruh dan telah dikinikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu berupaya melaporkan laporan BMPK secara online melalui apolo OJK setiap bulan secara tepat waktu.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam setiap pemberian kredit maupun penempatan dana di bank lain, BPR senantiasa memperhatikan ketentuan BMPK sehingga tidak melanggar.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan KPM yaitu Walikota Blitar
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis BPR dibuat sesuai cakupan yang dimaksud dalam ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis selalu dikonsultasikan dengan KPM dan mendapat dukungan / persetujuan dari KPM.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan minimal.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Pengawas berupaya melaksanakan pengawasan melalui evaluasi - evaluasi yang dilakukan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis, senantiasa diupayakan untuk disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan BPR yang belum dapat mendukung sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan. Di beberapa pelaporan, masih ada yang harus dihitung ulang secara manual untuk mencocokkan kebenarannya.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan dan format yang telah ditentukan, dan selanjutnya BPR melakukan publikasi atas laporan tersebut.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR berupaya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang sesuai ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan juga dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan yang ada.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Kota Blitar

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Segala puji syukur kehadiran ALLAH tak lupa kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, doa dan pengharapan juga kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan

Kami sadar apabila laporan yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah berupaya menyusun secara maksimal mungkin, baik dalam segi keakuratan data, informasi, penyajian, maupun penulisan kata.

Demikian Laporan Tata Kelola **Perumda BPR Kota Blitar** untuk periode 31 Desember 2023 kami susun dan kami sampaikan.

Kota Blitar, 30 Januari 2024

Perumda BPR Kota Blitar

Menyetujui,


Mokhamad Sidik
Ketua Dewan Pengawas




Edy Prasetyo
Direktur


Raden Agung Andokoputro
Anggota Dewan Pengawas

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

Profil BPR :

Nama BPR = Perumda BPR Kota Blitar
Alamat BPR = Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
Posisi Laporan = Desember 2023
Modal Inti BPR = Rp. 9,759,282,914
Total Aset BPR = Rp. 24,302,939,986
Bobot BPR = B
Status Audit = 1

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR :

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.50	0.31	-	0.26	0.25	0.27	0.05	0.23	0.16	0.17	0.19	2.4
Peringkat Komposit	Baik											

Analisis = Hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komperhensif menempatkan Perumda BPR Kota Blitar pada predikat BAIK, dengan Nilai Komposit 2,4 dan Peringkat Komposit 2. Hasil tersebut tidak terlepas dari belum terpenuhinya komposisi minimal jumlah Direksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan secara relatif signifikan. Di kesempatan selanjutnya akan segera dilakukan pemenuhan jumlah pengurus, agar hasil penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Kota Blitar menjadi semakin membaik, sehingga mampu mencetak kinerja yang lebih baik lagi dalam kondisi perekonomian nasional belum stabil.

Kota Blitar, 30 Januari 2024
Perumda BPR Kota Blitar
Pengurus,

Mokhammad Sidik
Ketua Dewan Pengawas

Raden Agung Andokoputro
Anggota Dewan Pengawas



Edy Prasetyo
Direktur